



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PERUBAHAN ALOKASI BELANJA MODAL

Filma Ayu Dian Palupi*
 Sulardi

Universitas Sebelas Maret
 *Email: palupifilma15@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this study is to examine and find scientific evidence about the impact into changing in original local government revenue, general allocation grant, special allocation fund, and unspent funds toward the changing in the allocation of capital expenditure on regencies in Indonesia. The sample of this study are the regencies in Indonesia taken by purposive sampling method. The analysis method that appropriate in this study is multiple linier regressions. The result of the data test proves that the changing of original local government revenue does not affect in the changing of capital expenditure allocation, the changing of general allocation grant negatively affected the changing of capital expenditure allocation, the changing of special allocation fund has positive effect to the changing of capital expenditure allocation, and the changing of unspent funds have positive effect to the changing of capital expenditure allocation. The conclusion of this study can be used as a reference in making a budget in order to achieve an effective and efficient budget, and can optimize the potential of the region, especially for public services. This study differs from prior research which using only local government budget changes in the same year without involving the realization.

INFO ARTIKEL

Diterima:

Direview:

Disetujui:

Terbit:

Keywords:

Original Local Government Revenue, General Allocation Grant, Special Allocation Fund, unspent funds, and Capital Expenditure.

PENDAHULUAN

Indonesia sejak tahun 2001 telah melaksanakan otonomi daerah. Dalam suatu otonomi daerah proses penyusunan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu hal utama dalam mengelola keuangan daerah. APBD menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD terdiri dari beberapa komponen, antara lain yaitu komponen pendapatan, belanja daerah, dan pembiayaan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kemendagri Nomor 29 Tahun 2002 pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa susunan APBD adalah suatu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan.

Komponen pendapatan pemerintah daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Hal ini telah dijelaskan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 ayat (2). Komponen pembiayaan pemerintah daerah merupakan suatu penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. UU Nomor 33 Tahun 2004

pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sementara komponen belanja adalah suatu komponen APBD yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 belanja daerah merupakan seluruh kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Salah satu komponen belanja yang sangat penting dan masih menjadi masalah bagi sebagian besar pemerintah daerah adalah belanja modal.

Belanja modal menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 2 adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset yang memiliki manfaat jangka panjang (lebih dari satu tahun periode akuntansi). Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, pemerintah pusat terus menghimbau agar pemerintah daerah dapat meningkatkan belanja modal sebesar 30 persen (keuda.kemendagri.go.id). Imanudin Abdullah, Peneliti *Institute for Development of Economic and Finance* (Indef) mengatakan bahwa hanya 24 persen saja dari total belanja pemerintah daerah digunakan untuk belanja modal dan 39 persen belanja pemerintah digunakan untuk belanja pegawai (Jakarta: Antara Bali- Kamis, 29 Desember 2016). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai dana transfer dialokasikan untuk dana pegawai. Jumlah dana transfer daerah yang terus meningkat seharusnya dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Gamawan Fauzi, Mendagri, apabila belanja pegawai dapat diturunkan dan dialokasikan pada belanja modal, maka APBD akan semakin sehat (keuda.kemendagri.go.id).

Dalam penetapan APBD perlu adanya suatu penyesuaian terhadap anggaran tersebut setelah pengimplementasiannya. Menurut Asmara (2010) perubahan anggaran dapat terjadi karena adanya suatu yang diharapkan pemerintah daerah dalam tercapainya kinerja suatu program sesuai dengan prediksi awal. Abdullah (2016) mendefinisikan perubahan anggaran dapat terjadi pada semua komponen APBD. Perubahan itu dapat terjadi karena adanya sumber penerimaan baru, perubahan kebijakan pemerintah tentang pajak dan retribusi daerah, dan adanya selisih SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran).

Abdullah (2016) mengatakan bahwa perubahan anggaran akan mengubah komposisi, posisi, dan proporsi rekening APBD. Hal tersebut termasuk komposisi belanja. Darwanto dan Yutikasari (2007) menyatakan bahwa pergeseran komposisi belanja dilakukan untuk meningkatkan investasi modal dalam bentuk aset tetap. Menurut Bappenas (2011) semakin tinggi rasio belanja modal suatu daerah maka semakin baik pula pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Abdullah dan Rona (2014) meneliti tentang pengaruh SiLPA, pendapatan sendiri, dan dana perimbangan terhadap belanja modal. Praptoyo dan Febriana (2015) meneliti tentang beberapa faktor yang memengaruhi belanja modal. Faktor tersebut adalah PAD, DAU, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan SiLPA. Penelitian lain (Hadiati dan Arwati, (2013) mengatakan bahwa Faktor-faktor yang memengaruhi alokasi belanja modal adalah PAD dan pertumbuhan ekonomi. Masing-masing penelitian yang telah dilakukan memiliki hasil yang berbeda. Studi ini dilakukan untuk mengetahui dan menemukan bukti ilmiah mengenai “pengaruh perubahan pendapatan asli daerah (Δ PAD), dana alokasi umum (DAU), perubahan dana alokasi khusus (Δ DAK), dan perubahan sisa lebih perhitungan anggaran (Δ SiLPA) terhadap perubahan alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Teori Agensi (*Agency Theory*)

(Jensen & Meckling, 1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak antara satu pihak (prinsipal) yang menghendaki pihak lain (agen) untuk memberikan jasa dengan cara pendelegasian wewenang pengambilan keputusan pada agen. Hal ini berarti ada suatu ketidaksetaraan posisi antara dua belah pihak, yaitu pihak yang satu lebih berkuasa atas pihak lainnya. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 pemerintahan di Indonesia dalam penyusunan APBD melibatkan dua belah pihak yang berhubungan satu sama lain dengan pihak legislatif bertindak menjadi prinsipal, sedangkan eksekutif sebagai agen. Pihak eksekutif memiliki tugas untuk membuat rancangan APBD

berdasar atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan prioritas anggaran guna diserahkan kepada pihak legislatif dikemudian hari untuk dikaji ulang dan dilakukan pembahasan bersama sebelum dipatenkan menjadi Perda (Peraturan daerah). Dilihat dari sudut pandang teori keagenan, hal seperti di atas adalah bentuk kontrak sebagai alat pengawasan legislatif terhadap eksekutif dalam pelaksanaan anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 ialah suatu rencana tahunan tentang keuangan pemerintah daerah yang didasarkan pada peraturan daerah. APBD menjadi dasar pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah selama satu tahun periode. Dalam APBD dapat diketahui kekayaan suatu daerah, karena APBD menggambarkan setiap pendapatan, pembiayaan, dan belanja pemerintah daerah. Mardiasmo (2002:61) mengatakan bahwa anggaran sektor publik dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen akuntabilitas pengelolaan dana publik.

Perubahan APBD

Menurut Asmara (2010) perubahan suatu APBD yang sedang berjalan adalah suatu keniscayaan ketika asumsi-asumsi dan faktor-faktor lain yang uncontrollable nyatanya tidak sesuai dengan prediksi awal. Namun, perubahan anggaran ini bisa terjadi karena adanya suatu yang diharapkan pemerintah daerah dalam tercapainya kinerja suatu program sesuai dengan prediksi awal. Abdullah (2016) mendefinisikan perubahan anggaran sebagai suatu bentuk pengupayaan dari pemerintah daerah dalam menyesuaikan rencana finansialnya terhadap suatu perkembangan yang terjadi. Perubahan itu sendiri dapat terjadi pada semua komponen APBD. Abdullah et.al. (2014) mengatakan bahwa suatu perubahan anggaran akan berdampak pada berubahnya belanja. Dalam hal ini termasuk unit belanja modal. Abdullah dan Rona (2014) menyatakan bahwa praktik di lapangan mengenai penambahan alokasi belanja modal masih besar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasar UU Nomor 33 Tahun 2004, PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dipungut berdasar peraturan daerah dan bersumber pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD dapat menjadi salah satu faktor penentu kemandirian keuangan suatu daerah. Suzan dan Erawati (2015) menyatakan bahwa kemandirian keuangan suatu daerah ditentukan berdasar besar kecilnya PAD.

Rinaldi (2012) menyatakan bahwa PAD dapat ditafsirkan sebagai contoh indikator pengukur tingkat kemandirian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Semakin tinggi angka PAD pada APBD maka menunjukkan bahwa semakin besar kemandirian suatu daerah dari pemerintah pusat. Niode et.al. (2016) menyebutkan bahwa adanya PAD dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan dapat menambah investasi pemerintah daerah, sehingga dapat memperbaiki kualitas pelayanan terhadap publik.

Hasil studi sebelumnya yang telah dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007), Hadiati dan Arwati (2013), dan Rachmawati (2014) menyebutkan apabila pendapatan asli daerah memengaruhi alokasi belanja modal secara positif. Sedangkan studi lain oleh Hetika et.al. (2015) menyebutkan apabila PAD memengaruhi alokasi belanja modal secara negatif. Penelitian lain oleh Abdullah dan Rona (2014) menyatakan bahwa PAD tidak memengaruhi perubahan alokasi belanja modal. Menurut hasil pada studi sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut.

H1: Perubahan PAD berpengaruh positif terhadap perubahan alokasi belanja modal daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 DAU merupakan dana yang diberikan kepada daerah dari pendapatan APBN untuk tercapainya pemerataan dalam hal financial antara daerah satu dengan lainnya dalam pelaksanaan desentralisasi. Hal ini berarti bahwa penerimaan DAU tiap daerah tidak sama. Rotinsulu et.al. (2015) mengatakan bahwa daerah dengan PAD rendah akan mendapat DAU

yang tinggi dan sebaliknya. Sehingga secara seharusnya DAU akan memiliki efek distributif dan alokatif yang sama dengan PAD. Kenyataannya, dalam studi empiris pengeluaran daerah oleh DAU sering lebih besar dibandingkan pengeluaran oleh PAD. Penelitian oleh Milas dan Legrenzi (2001) dengan menggunakan sampel di Italia menemukan bahwa dana transfer (dalam hal ini adalah DAU) memiliki pengaruh terhadap belanja daerah.

Hasil penelitian sebelumnya oleh Darwanto dan Yustikasari (2007), Hadiati dan Arwati (2013), dan Praptoyo dan Febriana (2015) menyebutkan bahwa DAU memengaruhi alokasi belanja modal secara positif. Penelitian lain oleh Nuzana dan Riharjo (2016) menyatakan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal. Berdasarkan atas hasil studi terdahulu, maka dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut.

H2: Perubahan DAU berpengaruh positif terhadap perubahan alokasi belanja modal daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 DAK merupakan dana yang diberikan kepada daerah dari pengalokasian pendapatan APBN untuk mendanai kegiatan khusus yang sesuai prioritas nasional di daerah. Praptoyo dan Febriana (2015) mengatakan bahwa DAK yang merupakan dana perimbangan dari pusat digunakan dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap publik sesuai prioritas nasional. DAK bersumber pada pendapatan APBN untuk mendanai kebutuhan khusus suatu daerah. DAK yang pembentukannya khusus untuk mendanai kegiatan dalam peningkatan pelayanan publik dan sudah ditentukan oleh pusat, maka realisasi dari DAK tersebut merupakan belanja modal.

Rachmawati (2014) menemukan bahwa DAK memengaruhi secara positif alokasi belanja modal. Studi lain oleh Nuzana dan Riharjo (2016) dan Praptoyo dan Febriana (2015) menyatakan bahwa DAK tidak memengaruhi alokasi belanja modal. Sehingga berdasar atas hasil studi sebelumnya, maka layak untuk ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut.

H3: Perubahan DAK berpengaruh positif terhadap perubahan alokasi belanja modal daerah.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja, serta penerimaan dan pembiayaan dalam APBD pada satu periode anggaran. Abdullah dan Rona (2014) menyebutkan bahwa sisa anggaran diestimasi akan ditransfer sebagai sumber pendanaan pada tahun anggaran selanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa SiLPA akan mengalami penyesuaian dengan perubahan alokasi belanja modal secara tidak langsung. Abdullah (2016) menyebutkan bahwa SiLPA dapat digunakan untuk mendanai aktivitas yang masih belum terselesaikan di tahun anggaran sebelumnya maupun aktivitas yang sebelumnya belum masuk dalam anggaran APBD.

Supadmi dan Sugiarti (2014) dan Yudiaatmaja et.al. (2016) menemukan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Penelitian lain oleh Nuzana dan Riharjo (2016) menyatakan bahwa SiLPA tidak memengaruhi alokasi belanja modal. Didasarkan atas hasil studi terdahulu, maka dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut.

H4: Perubahan SiLPA berpengaruh positif terhadap perubahan alokasi belanja modal daerah.

Belanja Modal

Belanja modal menurut Pernyataan Akuntansi Pemerintah No 2 merupakan pembiayaan anggaran guna memperoleh berbagai aset yang memiliki nilai ekonomi lebih dari satu periode akuntansi. Abdullah dan Halim (2006) mengatakan bahwa anggaran atas belanja modal ditujukan guna memenuhi keperluan publik berupa sarana dan prasarana umum. Abdullah et.al. (2014) mengatakan bahwa penganggaran belanja modal tidak terlepas dari sumber penerimaan untuk mendanai belanja tersebut. Sehingga untuk melakukan perubahan pada belanja modal harus mengetahui komponen-komponen yang menjadi sumber penerimaan. Menurut “Abdullah dan Rona (2014), perubahan atas anggaran khususnya belanja bisa mencerminkan perubahan sasaran pada orientasi pembangunan daerah serta layanan publik.

METODOLOGI PENELITIAN

Objek Penelitian

Dalam studi ini digunakan data sekunder, yaitu APBD murni ataupun perubahan dan realisasi APBD kabupaten/kota di Indonesia sebagai sumber data penelitian. Data yang digunakan bersumber dari situs web resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, yaitu www.djpk.kemenkeu.go.id. Populasi pada studi ini ialah semua kabupaten/kota yang ada di Indonesia selama tahun 2015-2016. Pada studi ini digunakan metode *purposive sampling* untuk pengambilan sampelnya. Menurut Sekaran (2013), *Purposive sampling* adalah teknik *sampling* menggunakan tipe spesifik dari seseorang yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria yang dipakai pada studi ini ialah (1) Kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang mempublikasikan APBD murni ataupun perubahan pada tahun 2015-2016 dan realisasi APBD tahun 2014-2015; (2) Kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang melaporkan realisasi anggaran PAD, DAU, DAK, dan SiLPA.

Definisi Operasional Variabel

Variabel Independen

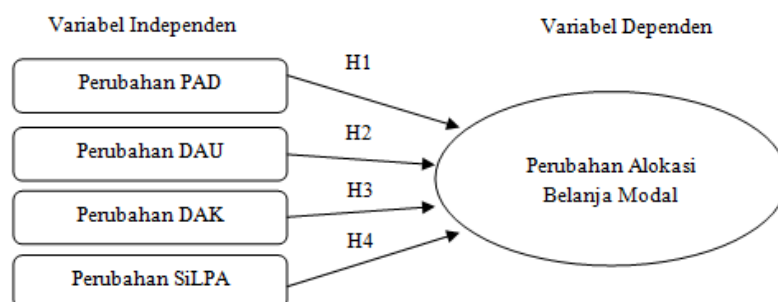
Variabel independen yang dipakai pada studi ini ialah perubahan PAD, perubahan DAU, perubahan DAK, perubahan SiLPA. Masing-masing variabel independen yang digunakan diperoleh dengan cara yang sama, yaitu dengan mencari selisih angka dalam realisasi anggaran tahun 2015 dengan 2014. Perubahan PAD diperoleh dengan mencari selisih antara PAD tahun 2015 dengan 2014. Perubahan DAU diperoleh dengan mencari selisih antara DAU tahun 2015 dengan 2014. Perubahan DAK diperoleh dengan mencari selisih antara DAK tahun 2015 dengan 2014. Perubahan SiLPA diperoleh dengan mencari selisih antara SiLPA tahun 2015 dengan 2014.

Variabel Dependen

Variabel dependen pada studi ini ialah perubahan belanja modal. Perubahan belanja modal diukur dengan menghitung selisih antara belanja modal dalam APBD tahun 2015 dan tahun 2016.

Model Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik suatu kerangka berpikir seperti model di bawah ini.



Gambar 1: Model Penelitian

Teknik Analisis

Berdasar kerangka teori dan hipotesis yang sudah dipaparkan, maka metode yang akan dipergunakan pada pengujian hipotesis studi ini ialah analisis regresi linear berganda. Persamaan regresi yang dipakai yaitu sebagai berikut ini.

$$\Delta BM = \alpha + \beta_1 \Delta PAD + \beta_2 \Delta DAU + \beta_3 \Delta DAK + \beta_4 \Delta SiLPA + \varepsilon$$

Keterangan:

ΔBM : Perubahan Belanja Modal

ΔPAD : Perubahan Pendapatan Asli Daerah

ΔDAU : Perubahan Dana Alokasi Umum

Δ DAK : Perubahan Dana Alokasi Khusus
 Δ SiLPA : Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
 α : Konstanta
 β : Koefisien Regresi
 ε : Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengambilan Sampel

Sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dalam pengambilan sampel, maka jumlah kabupaten/kota yang dijadikan sampel pada studi ini berjumlah 485 kabupaten/kota. Sedangkan 60 kabupaten/kota di antaranya merupakan data *outlier*, sehingga total sampel yang diakui pada studi ini sejumlah 425 kabupaten/kota di yang ada Indonesia. Beberapa data dinyatakan *outlier* dikarenakan dalam penelitian ini ketika dilakukan uji heteroskedastisitas data masih tidak memenuhi syarat, sehingga data yang memiliki *z-score* tinggi ($-2,5 < z < 2,5$) harus dihilangkan. Dalam menggunakan metode ini ditemukan data *outlier* sebanyak 59. Kemudian satu data *outlier* diperoleh dengan menggunakan metode *lag* untuk menghilangkan masalah autokorelasi. Berikut ini adalah tabel atas pengambilan sampel dalam penelitian ini.

Tabel 1.
Pemilihan Sampel

| Kriteria Sampel | Jumlah |
|--|--------|
| Jumlah kabupaten/kota di Indonesia (tidak termasuk 5 kota administratif dan 1 kabupaten administratif di Provinsi DKI Jakarta) | 508 |
| Jumlah kabupaten/kota tidak sesuai kriteria | 23 |
| Data <i>outlier</i> | 60 |
| Jumlah kabupaten/kota yang menjadi sampel | 425 |

Sumber: Data diolah, 2018

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan suatu alat uji yang dimaksudkan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel independen atau lebih dengan satu variabel dependen. Instrumen pengujian data yang dioperasikan pada studi ini yaitu SPSS 21. Hasil pengujian regresi linier berganda pada studi ini menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$\Delta BM = 8,188 + 0,067\Delta PAD - 0,172\Delta DAU + 0,151\Delta DAK + 0,189\Delta SiLPA$$

Didasarkan atas persamaan regresi yang ada, maka disimpulkan apabila variabel ΔPAD , ΔDAK , dan $\Delta SiLPA$ mempunyai pengaruh positif terhadap variabel ΔBM . Sedangkan variabel ΔDAU memengaruhi ΔBM secara negatif.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian dengan koefisien determinasi dimaksudkan untuk melihat *goodness-fit* model regresi. Uji ini menunjukkan tingkat besarnya variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Hasil uji ini dapat dilihat dari nilai *Adjusted R²* dengan nol sampai dengan satu. Misalkan suatu nilai *Adjusted R²* menunjukkan angka yang mendekati 1. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel dependen yang digunakan memberikan hampir seluruh informasi untuk menjelaskan variabel dependennya.

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | 0,525 | 0,276 | 0,269 | 0,045390 |

Sumber: Pengolahan Data SPSS, 2018

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa angka pada kolom *Adjusted R²* di hasil pengujian studi ini menunjukkan angka 0,269 atau dalam persen menjadi 26,9%. Ini berarti 26,9% nilai variabel dependen (Δ BM) dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel independen berupa Δ PAD, Δ DAU, Δ DAK, dan Δ SiLPA. Sedangkan 73,1% lainnya dapat dijelaskan dengan faktor lain yang diluar model regresi studi ini.

Uji Simultan

Pengujian simultan dimaksudkan untuk melihat mungkinkah variabel independen secara bersamaan memengaruhi variabel dependennya. Nilai signifikansi pada uji F ini ialah 5%. Apabila *p-value* < 0,05, maka hipotesis penelitian ini dinyatakan diterima atau variabel independen secara bersamaan memengaruhi variabel dependennya. Pengujian simultan pada studi ini dapat diamati melalui tabel 7 berikut ini.

Tabel 7
Hasil Uji Simultan

| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|------------|----------------|-----|-------------|--------|--------------------|
| Regression | 0,330 | 4 | 0,082 | 40,004 | 0,000 ^b |
| Residual | 0,865 | 420 | 0,002 | | |
| Total | 1,195 | 424 | | | |

Sumber: Pengolahan Data SPSS, 2018

Didasarkan atas tabel 7 di atas, maka dapat diketahui apabila hasil uji F dalam penelitian ini menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai tersebut jauh dari tingkat signifikansi yang senilai 0,05. Ini membuktikan bahwa keempat variabel independen, yaitu Δ PAD, Δ DAU, Δ DAK, Δ SiLPA secara bersamaan (simultan) memengaruhi variabel dependen berupa perubahan alokasi belanja modal.

Uji Parsial (Uji t)

Pengujian parsial digunakan untuk mengetahui efek dari masing-masing variabel independen dalam memengaruhi variabel dependennya. Nilai signifikansi dalam uji t ialah 5%. Apabila suatu variabel menghasilkan *p-value* < 0,05, dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut dinyatakan memengaruhi variabel dependennya. Hasil uji t atas empat variabel independen (Δ PAD, Δ DAU, Δ DAK, dan Δ SiLPA) dalam studi ini dapat diamati melalui tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8
Hasil Uji Parsial

| Variabel | <i>Unstandardized Coefficients</i> | | <i>Standardized Coefficients</i> | t | Sig. |
|----------------|------------------------------------|------------|----------------------------------|--------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| Konstan | 8,188 | 0,536 | | 15,283 | 0,000 |
| Δ PAD | 0,067 | 0,070 | 0,080 | 0,947 | 0,344 |
| Δ DAU | -0,172 | 0,041 | -0,386 | -4,228 | 0,000 |
| Δ DAK | 0,151 | 0,014 | 0,546 | 10,633 | 0,000 |
| Δ SiLPA | 0,189 | 0,028 | 0,286 | 6,854 | 0,000 |

Sumber: Pengolahan Data SPSS, 2018

Tabel tersebut membuktikan apabila variabel Δ PAD memiliki nilai signifikansi senilai 0,344 yang lebih besar dari angka 0,05, sehingga Δ PAD dinyatakan tidak memengaruhi perubahan alokasi belanja modal. Sedangkan untuk ketiga variabel lain (Δ DAU, Δ DAK, Δ SiLPA) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,00 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Ini membuktikan ketiga variabel tersebut dinyatakan memengaruhi perubahan alokasi belanja modal secara signifikan. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan alokasi belanja dipengaruhi oleh perubahan DAU, perubahan DAK, dan perubahan SiLPA. Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, maka penjelasan atas keempat hipotesis pada studi ini dapat dijabarkan di bawah ini.

H1. Perubahan PAD berpengaruh positif terhadap perubahan alokasi belanja modal.

Hasil pengujian atas variabel Δ PAD menghasilkan t-hitung 0,947 dengan nilai signifikansi 0,344. Angka pada signifikansi tersebut jauh di atas 5%. Ini dapat membuktikan bahwa variabel Δ PAD tidak memengaruhi perubahan alokasi belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) ditolak.

H2. Perubahan DAU berpengaruh positif terhadap perubahan alokasi belanja modal.

Hasil pengujian atas Δ DAU menghasilkan t-hitung yaitu (-4,228) dengan nilai signifikansi pada 0,000. Signifikansi tersebut ada di bawah 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Δ DAU memengaruhi perubahan alokasi belanja modal secara signifikan. Sedangkan nilai t-hitung yang bernilai negatif menunjukkan variabel Δ DAU memengaruhi perubahan alokasi belanja modal secara negatif. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ke-dua (H2) ditolak.

H3. Perubahan DAK berpengaruh positif terhadap perubahan alokasi belanja modal.

Hasil pengujian atas Δ DAK menghasilkan t-hitung yaitu 10,633 dengan nilai signifikansi pada 0,000. Signifikansi tersebut di bawah 5%, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Δ DAK memengaruhi perubahan alokasi belanja modal secara signifikan. memengaruhi perubahan alokasi belanja modal secara positif. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ke-tiga (H3) diterima.

H4. Perubahan SiLPA berpengaruh positif terhadap perubahan alokasi belanja modal.

Hasil pengujian atas variabel Δ SiLPA menghasilkan t-hitung 6,854 dengan nilai signifikansi pada 0,000. Signifikansi tersebut di bawah 5%, sehingga dikatakan bahwa variabel Δ SiLPA memengaruhi perubahan alokasi belanja modal secara signifikan. Sedangkan nilai t-hitung bernilai positif menunjukkan bahwa variabel Δ SiLPA memengaruhi perubahan alokasi belanja modal secara positif. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ke-empat (H4) diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Perubahan PAD terhadap Perubahan Alokasi Belanja Modal

Pengujian atas variabel Δ PAD terhadap variabel dependen Δ BM yang telah dilakukan memperoleh hasil bahwa perubahan PAD tidak memengaruhi perubahan alokasi belanja modal. Studi ini tidak konsisten dengan studi oleh Darwanto dan Yustikasari (2007), Hadiati dan Arwati (2013), dan Rachmawati (2014) yang menyimpulkan bahwa PAD memengaruhi alokasi belanja modal secara positif. Hal ini tidak pula sesuai penelitian oleh Hetika et.al. (2015) yang menyatakan bahwa PAD memengaruhi belanja modal secara negatif. Namun, hasil studi ini sesuai dengan hasil studi oleh Abdullah dan Rona (2014) yang menyimpulkan bahwa perubahan PAD tidak memengaruhi perubahan alokasi belanja modal.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa PAD bukanlah sumber pendanaan yang digunakan untuk membiayai belanja modal. PAD sendiri sering dianggarkan dengan tidak memiliki kepastian tinggi dalam pencapaian target. Hal ini disebabkan oleh masalah keagenan yang disebut dengan rent-seeking politis dan birokrasi penyelenggaraan administrasi pajak (Fjeld dan Semboja, 2000) dalam Abdullah dan Rona (2014). Besarnya tingkat perubahan PAD ternyata tidak memiliki kontribusi dalam perubahan alokasi belanja modal melainkan dapat memiliki kontribusi dalam perubahan alokasi belanja selain belanja modal, misalnya belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Pengaruh Perubahan DAU terhadap Perubahan Alokasi Belanja Modal

Hasil pengujian atas variabel Δ DAU terhadap perubahan alokasi belanja modal yang telah dilakukan memperoleh hasil bahwa perubahan DAU berpengaruh negatif terhadap perubahan alokasi belanja modal. Hal ini tidak konsisten dengan hasil penelitian oleh Darwanto dan Yustikasari (2007), Hadiati dan Arwati (2013), dan Praptoyo dan Febriana (2015) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Namun, hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian oleh Nuzana dan Riharjo (2016) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa daerah yang menerima DAU tinggi memiliki belanja modal yang rendah dan sebaliknya, apabila daerah menerima DAU rendah justru memiliki belanja modal yang tinggi. Hal ini berarti DAU bukan merupakan sumber pendanaan yang digunakan untuk membiayai belanja modal. DAU yang bersifat bebas digunakan tanpa ada batasan oleh pemerintah daerah cenderung lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing daerah. DAU digunakan untuk menutup biaya administrasi karena banyaknya kelebihan jumlah pegawai di suatu daerah. Hal ini menyebabkan DAU belum banyak dialokasikan untuk membiayai belanja modal (Sumardjoko dan Irwanto, 2015) dalam Nuzana dan Riharjo (2016).

Pengaruh Perubahan DAK terhadap Perubahan Alokasi Belanja Modal

Hasil pengujian atas variabel Δ DAK terhadap perubahan alokasi belanja modal yang telah dilakukan memperoleh hasil bahwa perubahan DAK memengaruhi perubahan alokasi belanja modal secara positif. Hasil ini tidak konsisten dengan studi oleh Nuzana dan Riharjo (2016) dan Praptoyo dan Febriana (2015) yang menyimpulkan bahwa DAK tidak memengaruhi alokasi belanja modal. Namun, hasil dari studi ini konsisten dengan hasil studi oleh Rachmawati (2014) yang menyimpulkan bahwa DAK memengaruhi alokasi belanja modal secara positif.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa perubahan DAK memiliki kontribusi dalam pengalokasian belanja modal daerah. Semakin tinggi DAK daerah tertentu maka semakin besar tingkat belanja modal daerah. DAK merupakan dana perimbangan untuk kegiatan tertentu khususnya dalam peningkatan pelayanan publik. Ini berarti secara otomatis keluarannya adalah belanja modal. Hal tersebut berarti bahwa DAK dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan untuk membiayai belanja modal.

Didasarkan atas hasil studi di atas, pemerintah daerah diharapkan untuk mengoptimalkan pengadaan barang publik. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan terhadap publik khususnya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, semakin tinggi tingkat belanja modal juga akan meningkatkan infrastruktur yang ada pada daerah tersebut.

Pengaruh Perubahan SiLPA terhadap Perubahan Alokasi Belanja Modal

Hasil pengujian atas variabel Δ SiLPA terhadap perubahan alokasi belanja modal yang telah dilakukan memperoleh hasil bahwa perubahan SiLPA berpengaruh positif terhadap perubahan alokasi belanja modal. Hasil ini tidaklah sejalan dengan hasil studi oleh Nuzana dan Riharjo (2016) yang menyatakan SiLPA tidak memengaruhi alokasi belanja modal. Namun, hasil dari studi ini konsisten dengan studi oleh Supadmi dan Sugiarti (2014) dan Yudiaatmaja *et.al.* (2016) yang menyimpulkan bahwa SiLPA memengaruhi alokasi belanja modal secara positif.

Hasil studi ini menunjukkan perubahan SiLPA memiliki kontribusi dalam pengalokasian belanja modal daerah. Semakin besar SiLPA suatu daerah maka semakin tinggi belanja modal suatu daerah. SiLPA yang merupakan sisa lebih realisasi pendapatan dengan belanja serta penerimaan dan pembiayaan dapat dijadikan sumber pembiayaan yang dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan dan belanja di tahun selanjutnya, termasuk pengalokasian untuk belanja modal. Namun di sisi lain, banyaknya SiLPA sering kali dianggap sebagai suatu tindakan tidak bertanggung jawab. Hal ini berkaitan dengan adanya kemungkinan SKPD dalam tindakan penggelembungan (*mark-up*) pada

sasaran belanja dan pengecilan (*mark-down*) pada pendapatannya di suatu penyusunan anggaran. Hal tersebut dapat mengakibatkan adanya kesenjangan dan varian anggaran (Abdullah, 2016).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan dianalisis maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh perubahan PAD, DAU, DAK, dan SiLPA terhadap perubahan alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah 425 kabupaten/kota di Indonesia tahun 2015-2016 yang diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Secara bersama-sama (simultan), pengujian atas variabel independen berupa Δ PAD, Δ DAU, Δ DAK, dan Δ SiLPA terhadap perubahan alokasi belanja modal memiliki hasil yang positif signifikan. Berdasarkan uji koefisien determinasi yang menghasilkan nilai sebesar 0,269 menunjukkan bahwa 26,9% perubahan alokasi belanja modal dipengaruhi oleh perubahan PAD, DAU, DAK, dan SiLPA. Secara parsial, hasil pengujian atas variabel independen berupa Δ PAD memiliki hasil positif tidak signifikan atau tidak memiliki pengaruh terhadap perubahan alokasi belanja modal. Sedangkan untuk variabel independen berupa Δ DAU memiliki hasil negatif signifikan terhadap perubahan alokasi belanja modal. Namun, untuk variabel independen berupa Δ DAK dan Δ SiLPA memiliki hasil yang positif dan signifikan terhadap perubahan alokasi belanja modal.

Penelitian ini juga memiliki implikasi bagi akademisi untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh perubahan PAD, DAU, DAK, dan SiLPA terhadap perubahan alokasi belanja modal pada laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2015-2016, sehingga dapat menjadi acuan dalam melakukan penelitian serupa selanjutnya. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan perubahan anggaran khususnya perubahan alokasi belanja modal pada daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam membuat suatu anggaran agar dapat tercapai suatu anggaran yang efektif dan efisien, serta dapat mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki khususnya dalam pelayanan terhadap publik.

Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, karena dalam penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan yang dapat diperbaiki dalam penelitian selanjutnya yang serupa. Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain adalah Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebatas dua tahun pengamatan yaitu tahun 2015 dan 2016 dengan menggunakan selisih data pada tahun tersebut, sehingga data bersifat *cross section*. Variabel independen yang digunakan masih memiliki persentase yang kecil dalam menjelaskan variabel dependennya. Selain itu, hasil pengujian atas variabel independen juga masih ada yang belum berpengaruh secara signifikan. Penelitian ini masih belum memisahkan data antara kabupaten dan kota, sehingga belum bisa membandingkan perubahan yang terjadi pada anggaran kota dan anggaran kabupaten. Sehingga bagi Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah periode pengamatan agar data yang digunakan tidak hanya bersifat *cross section* melainkan juga *time series*, sehingga dapat terlihat variasi data antar tahun pengamatan. Selain itu peneliti dapat menambah variabel independen lainnya yang memiliki pengaruh lebih besar dalam menjelaskan perubahan alokasi belanja modal. Misalnya dengan menambahkan variabel dependen berupa kebijakan pemerintah. Peneliti juga dapat memisahkan antara data kabupaten dengan kota, sehingga dapat membandingkan perubahan anggaran antara anggaran kabupaten dengan anggaran kota.

REFERENSI

Abdullah, Syukriy & Darwanis Sari. (2016). Pengaruh Perubahan Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Anggaran Dana Bagi Hasil, dan Perubahan Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh). Jurnal Magister Akuntansi Vol 5 No 2 Mei 2016. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.

- _____ dan Abdul Halim. (2006). Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(2), 12-32.
- _____ dan Riza Rona. (2014). Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal, Studi atas Perubahan Anggaran Kabupaten/Kota di Indonesia. *Iqtishadia*, 7(1), 179-202.
- _____, Marzalita, dan Nadirsyah. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Belanja Barang dan Jasa pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Magister Akuntansi*, 3(3), 46-58.
- Asmara, Jhon Andra. (2010). Analisis Perubahan Alokasi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 3(2), 155-157.
- Atmoko, Citro dan Gusti Bagus Widyantara. (2016, Desember). Peneliti: Pemerintah Perlu Batasi Alokasi Belanja Pegawai. Antara Bali. Diambil dari <https://www.antarabali.com/berita/100490/peneliti-pemerintah-perlu-batasi-alokasi-belanja-pegawai>
- Bappenas. (2011). Analisis Kesenjangan Antarwilayah. Diambil dari <http://simreg.bappenas.go.id/document/Publikasi/DokPub/Analisis%20Kesenjangan%20sosial2011.pdf>
- Darwanto dan Yustikasari. (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makassar*.
- Ditjen Keuangan Daerah. Belanja Modal Pemda Harus Capai 30 Persen. Diambil dari <http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/41-belanja-modal-pemda-harus-capai-30-persen>
- Ghozali, Imam. (2006). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadiati, Novita dan Dini Arwati. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. *Jurnal Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan 2013*.
- Hetika, Andri Widiyanto, dan Yeni Priatna Sari. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan.
- Jensen, Michael C, dan William H. Meckling. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. 3, 305-360.
- Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.
- Milas, Costas dan Gabriella Legrenzi. (2002). Asymetric and Non-linear Adjustment in the Revenue-expenditure Models. Brunel University. Working Paper.
- Niode, Audie O, Antunius Y Luntungan, dan Chindy Febri Rori. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 243-254.
- Nuzana, Merizal dan Ikhsan Budi Riharjo. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(10).
- Praptoyo, Sugeng dan Imas Sherli Febriana. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(9), 1-22.

- Rachmawati, Mia. (2017). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat). *Jurnal Respositori UPY*.
- Republik Indonesia. (2002). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- _____. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- _____. (1999). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Rinaldi, Udin. (2012). Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal EKSOS*, 8(2), 105-113.
- Rotinsulu, Debby Ch., Anderson G. Kumenaung, dan Ferly Christian Kolinug. (2015). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 17(2).
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. (2013). *Research Method for Business*. UK: WILEY.
- Supadmi, Ni Luh dan Ni Putu Dwi Eka Rini Sugiathi. (2014). Pengaruh PAD, DAU, dan SiLPA pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7(2), 477-495.
- Suzan, Leny dan Nyoman Trisna Erawati. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung (Studi Kasus pada DPKAD Kota Bandung Periode 2009-2013). *Proceeding of Management*, 2(3), 3259-3266.
- Yudiatmaja, Fridayana, I wayan Suwendra, dan Resiana Sukmawati. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten. *Jurnal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen*, 4.